



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 25 November 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021; *RS*

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); *24*

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4673 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075); 

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp 7.584.929.735.729, -, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 6.283.641.817.542,-	
b. Belanja Daerah	Rp. 7.584.929.735.729,-	
	Defisit/ Surplus	Rp (1.301.287.918.187), -
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 1.711.064.158.187,-	
2. Pengeluaran	Rp. 409.776.240.000,-	
	Pembiayaan Netto	Rp 1.301.287.918.187,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun		
Berkenaan	Rp.	0,- 

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 6.283.641.817.542,- (enam triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.033.518.433.142,- (dua triliun tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.533.442.229.906,- (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.774.614.333,- (dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.348.316.130,- (sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 199.953.272.773,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.182.128.447.000,- (empat triliun seratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. 

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.994.937.400,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 7.584.929.735.729,- (tujuh triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.013.582.925.198,- (lima triliun tiga belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.561.997.607.953,- (satu triliun lima ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.551.161.659.889,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.307.557.170,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). *16*

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.808.722.980.430,- (satu triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 52.393.119.756,- (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.858.994.304.311,- (satu triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.261.658.911,- (seratus miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 428.790.271.942,- (empat ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.319.044.795.090,- (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.782.551.368, - (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah). 

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.123.915.460,- (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 644.228.590.760,- (enam ratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Tak Terduga :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 611.228.590.760,- (enam ratus sebelas miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.301.287.918.187,- (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.711.064.158.187,- (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. 

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.108.593.947.937,- (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.594.888.120.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.582.090.250,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 409.776.240.000,- (empat ratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempoh;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.776.240.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp 1.301.287.918.187,- (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 1.301.287.918.187,- (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). 

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

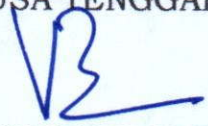
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 30 Desember 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(9-221/2020)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.033.518.433.142
4.1.01	Pajak Daerah	1.533.442.229.906
4.1.02	Retribusi Daerah	205.774.614.333
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.348.316.130
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199.953.272.773
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.182.128.447.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.182.128.447.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.994.937.400
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.994.937.400
	Jumlah Pendapatan	6.283.641.817.542
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	5.013.582.925.198
5.1.01	Belanja Pegawai	1.561.997.607.953
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.551.161.659.889
5.1.03	Belanja Bunga	39.307.557.170
5.1.05	Belanja Hibah	1.808.722.980.430
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.393.119.756
5.2	BELANJA MODAL	1.858.994.304.311
5.2.01	Belanja Modal Tanah	850.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.261.685.911
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.790.271.942
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.319.044.795.090
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.782.551.368
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	68.123.915.460
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	68.123.915.460
5.4	BELANJA TRANSFER	644.228.590.760
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	611.228.590.760
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.000.000.000
	Jumlah Belanja	7.584.929.735.729
	Total Surplus/(Defisit)	(1.301.287.918.187)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.711.064.158.187
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.593.947.937
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.711.064.158.187
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	409.776.240.000
	Pembiayaan Netto	1.301.287.918.187

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

24

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	135.956.169.000	3.231.270.498.644	1.653.851.047.542	0	0	4.885.121.546.186
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	971.708.000	2.534.371.149.324	270.111.993.431	0	0	2.804.483.142.755
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	971.708.000	2.534.371.149.324	270.111.993.431	0	0	2.804.483.142.755
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	128.766.650.000	425.075.364.933	71.381.619.354	0	0	496.456.984.287
1 02 1.02.0.00.0.00.02.00	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	120.000.000.000	252.711.619.942	26.341.676.679	0	0	279.053.296.621
1 02 1.02.2.12.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.766.650.000	172.363.744.991	45.039.942.675	0	0	217.403.687.666
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.380.311.000	195.746.444.049	1.306.084.444.455	0	0	1.501.830.888.504
1 03 1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	0
1 03 1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.380.311.000	195.746.444.049	1.305.885.894.455	0	0	1.501.632.338.504
1 03 2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	0
1 03 2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	0	198.550.000	0	0	198.550.000
1 03 5.02.2.10.0.00.01.00	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	0	0	0	0	0	0
1 03 5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0	0	0	0	0	0
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	13.751.698.590	0	0	0	13.751.698.590
1 04 1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	13.751.698.590	0	0	0	13.751.698.590
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	24.231.600.358	5.345.827.189	0	0	29.577.427.547
1 05 1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	0
1 05 1.02.2.12.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	0
1 05 1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	0	0	0	0	0
1 05 1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	0	15.175.011.558	1.228.205.753	0	0	16.403.217.311
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	7.956.665.760	4.117.621.436	0	0	12.074.287.196

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0
1	05	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	0	888.565.600	0	0	0	888.565.600
1	05	2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	211.357.440	0	0	0	211.357.440
1	05	2.17.2.07.3.32.01.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	0
1	05	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	0
1	05	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	0	0	0
1	05	2.24.2.23.0.00.01.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	0	0	0	0	0
1	05	3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0
1	05	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	0
1	05	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	0	0	0	0	0	0
1	05	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	0
1	05	3.29.1.03.0.00.01.00	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0
1	05	3.31.3.30.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0
1	05	4.01.0.00.0.00.01.00	Biro Umum	0	0	0	0	0	0
1	05	4.01.0.00.0.00.04.0000	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	0	0
1	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0	0	0
1	05	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0
1	05	5.02.2.10.0.00.01.00	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	0	0	0	0	0	0
1	05	5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0	0	0	0	0	0
1	05	5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0	0	0	0	0	0
1	05	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0	0	0	0	0	0
1	05	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	0
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	837.500.000	38.094.241.390	927.163.113	0	0	39.021.404.503
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	837.500.000	38.094.241.390	927.163.113	0	0	39.021.404.503
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51.908.770.550	281.382.707.485	31.186.283.428	0	0	312.568.990.913
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	4.716.250.846	117.585.333	0	0	4.833.836.179
2	07	2.17.2.07.3.32.01.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	4.716.250.845	117.585.333	0	0	4.833.836.179

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	407.339.000	10.336.224.570	22.307.250	0	0	10.358.531.820
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	407.339.000	10.336.224.570	22.307.250	0	0	10.358.531.820
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	1.312.166.060	0	0	0	1.312.166.060
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	1.312.166.060	0	0	0	1.312.166.060
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	909.659.000	0	0	0	909.659.000
2 10 1.03.1.04.2.10.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	909.659.000	0	0	0	909.659.000
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	47.203.774.550	91.613.991.286	4.940.960.313	0	0	96.554.951.599
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	47.203.774.550	91.613.991.286	4.940.960.313	0	0	96.554.951.599
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	2.083.020.410	147.788.332	0	0	2.230.808.742
2 12 1.02.2.12.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	2.083.020.410	147.788.332	0	0	2.230.808.742
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	85.450.000	45.020.318.998	1.169.612.600	0	0	46.189.931.598
2 13 2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.450.000	45.020.318.998	1.169.612.600	0	0	46.189.931.598
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.277.000.000	20.273.145.409	22.238.422.902	0	0	42.511.568.311
2 15 2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	2.277.000.000	20.273.145.409	22.238.422.902	0	0	42.511.568.311
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	135.080.000	11.889.629.504	245.890.190	0	0	12.135.519.694
2 16 2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	135.080.000	11.889.629.504	245.890.190	0	0	12.135.519.694
2 16 3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	0
2 16 5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0
2 16 5.02.2.10.0.00.01.00	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	0	0	0	0	0	0
2 16 8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	0

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	521.843.000	26.521.400.361	53.944.000	0	0	26.575.344.361
2 17 2.17.2.07.3.32.01.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	521.843.000	26.521.400.361	53.944.000	0	0	26.575.344.361
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	11.443.765.517	147.700.200	0	0	11.591.465.717
2 18 2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	11.443.765.517	147.700.200	0	0	11.591.465.717
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.237.586.000	23.133.856.377	268.554.007	0	0	23.402.410.384
2 19 2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.237.586.000	23.133.856.377	268.554.007	0	0	23.402.410.384
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	99.913.400	0	0	0	99.913.400
2 20 2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	99.913.400	0	0	0	99.913.400
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	353.345.830	37.089.760	0	0	390.435.590
2 21 2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	353.345.830	37.089.760	0	0	390.435.590
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	10.042.997.263	1.029.984.750	0	0	11.072.982.013
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	10.042.997.263	1.029.984.750	0	0	11.072.982.013
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	5.895.625.130	377.858.280	0	0	6.273.483.410
2 23 2.24.2.23.0.00.01.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	5.895.625.130	377.858.280	0	0	6.273.483.410
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	40.698.000	15.737.397.524	388.585.511	0	0	16.125.983.035
2 24 2.24.2.23.0.00.01.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	40.698.000	15.737.397.524	388.585.511	0	0	16.125.983.035
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	73.747.883.000	679.364.199.832	135.932.134.254	0	0	815.296.334.086
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.600.000.000	157.824.162.523	72.764.732.387	0	0	230.588.894.910
3 25 3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.600.000.000	157.824.162.523	72.764.732.387	0	0	230.588.894.910
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.397.112.000	29.262.024.800	3.404.953.263	0	0	32.666.978.063
3 26 3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.397.112.000	29.262.024.800	3.404.953.263	0	0	32.666.978.063
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	47.850.617.000	274.128.428.428	54.431.768.801	0	0	328.560.197.229

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3 27 3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	39.978.373.000	99.509.769.392	45.680.274.100	0	0	145.190.043.492
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.872.244.000	174.618.659.036	8.751.494.701	0	0	183.370.153.737
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	176.202.887.044	4.328.909.543	0	0	180.531.796.587
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	176.202.887.044	4.328.909.543	0	0	180.531.796.587
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	18.382.943.728	62.970.000	0	0	18.445.913.728
3 29 3.29.1.03.0.00.01.00	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0	18.382.943.728	62.970.000	0	0	18.445.913.728
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	2.747.630.640	772.395.300	0	0	3.520.025.940
3 30 3.31.3.30.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	2.747.630.640	772.395.300	0	0	3.520.025.940
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	900.154.000	19.919.458.181	161.004.960	0	0	20.080.463.141
3 31 3.31.3.30.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900.154.000	19.919.458.181	161.004.960	0	0	20.080.463.141
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	896.664.488	5.400.000	0	0	902.064.488
3 32 2.17.2.07.3.32.01.00	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	896.664.488	5.400.000	0	0	902.064.488
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.807.733.000	287.109.779.671	4.230.815.138	0	0	291.340.594.809
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	3.807.733.000	145.675.626.628	3.195.873.324	0	0	148.871.499.952
4 01 4.01.0.00.0.00.01.00	Biro Umum	3.595.032.000	120.154.644.177	2.109.245.460	0	0	122.263.889.637
4 01 4.01.0.00.0.00.02.00	Biro Hukum	0	3.260.502.420	386.574.000	0	0	3.647.076.420
4 01 4.01.0.00.0.00.03.0000	Biro Organisasi	0	3.341.878.812	114.898.560	0	0	3.456.777.372
4 01 4.01.0.00.0.00.04.0000	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	0	2.063.613.619	31.649.000	0	0	2.095.262.619
4 01 4.01.0.00.0.00.05.00	Biro Pemerintahan	0	3.504.200.440	35.339.200	0	0	3.539.539.640
4 01 4.01.0.00.0.00.06.00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0	8.606.355.900	162.669.704	0	0	8.769.025.604
4 01 4.01.2.16.0.00.07.0000	Biro Administrasi Pimpinan	212.701.000	4.744.431.260	355.497.400	0	0	5.099.928.660
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	141.434.153.043	1.034.941.814	0	0	142.469.094.857
4 02 4.02.0.00.0.00.02.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	141.434.153.043	1.034.941.814	0	0	142.469.094.857
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.018.209.261.992	495.063.609.846	31.152.084.538	68.123.915.460	644.228.590.760	1.238.568.200.604
5 01	PERENCANAAN	0	29.754.456.822	525.426.328	0	0	30.279.883.150
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	29.754.456.822	525.426.328	0	0	30.279.883.150
5 02	KEUANGAN	5.952.081.739.009	369.093.450.646	26.499.469.514	68.123.915.460	644.228.590.760	1.107.945.426.380
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan Daerah	4.740.223.556.981	235.754.371.790	1.473.639.160	68.123.915.460	644.228.590.760	949.580.517.170

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR									
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021									
Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.2.10.0.00.01.00	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.211.858.182.028	133.339.078.856	25.025.830.354	0	0	158.364.909.210
5	03		KEPEGAWAIAN	0	19.427.370.329	2.255.736.460	0	0	21.683.106.789
5	03	5.03.0.00.0.00.01.00	Badan Kepegawaian Daerah	0	19.427.370.329	2.255.736.460	0	0	21.683.106.789
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	64.659.509.983	59.566.982.065	589.527.000	0	0	60.156.509.065
5	04	5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	64.659.509.983	59.566.982.065	589.527.000	0	0	60.156.509.065
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	2.229.744.560	717.618.356	0	0	2.947.362.916
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	2.229.744.560	717.618.356	0	0	2.947.362.916
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN	0	13.678.728.630	564.306.880	0	0	14.243.035.510
5	06		PENGHUBUNG	0	0	0	0	0	0
5	06	5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0	8.020.558.530	329.466.880	0	0	8.350.025.410
5	06	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	0	5.658.170.100	234.840.000	0	0	5.893.010.100
5	07		PENGELOLAAN PERBATASAN	1.468.013.000	0	0	0	0	0
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	1.468.013.000	1.312.876.794	0	0	0	1.312.876.794
5	07	5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0	176.063.360	0	0	0	176.063.360
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	1.468.013.000	1.136.813.434	0	0	0	1.136.813.434
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	31.416.891.858	2.458.415.781	0	0	33.875.307.639
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	31.416.891.858	2.458.415.781	0	0	33.875.307.639
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0	31.416.891.858	2.458.415.781	0	0	33.875.307.639
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000	7.975.237.862	183.523.630	0	0	8.158.761.492
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.000.000	7.975.237.862	183.523.630	0	0	8.158.761.492
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000	7.975.237.862	183.523.630	0	0	8.158.761.492
TOTAL				6.283.641.817.542	5.013.582.925.198	1.858.994.304.311	68.123.915.460	644.228.590.760	7.584.929.735.729

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	4			PENDAPATAN DAERAH			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	971.708.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	971.708.000		
Jumlah Pendapatan										971.708.000		
0	00	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	5			BELANJA			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.804.483.142.755		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.955.237.842.964		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	00				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	471.100.314.872		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	01				Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	163.552.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	163.552.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.552.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.355.318.500		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	219.168.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	01	Belanja Pegawai	108.770.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.398.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2		BELANJA MODAL	117.136.149.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.065.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.982.084.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	48				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.708.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	48	5	1		BELANJA OPERASI	1.708.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	48	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	50				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	64.072.661.040		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	50	5	1		BELANJA OPERASI	64.072.661.040		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	50	5	1	01	Belanja Pegawai	1.821.600.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	50	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.251.061.040		

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.231.270.493.644	1.653.851.047.542	0	0	4.885.121.546.186
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.534.371.149.324	270.111.993.431	0	0	2.804.483.142.755
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.534.371.149.324	270.111.993.431	0	0	2.804.483.142.755
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	848.585.971.731	445.401.000	0	0	849.031.372.731
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.864.765	0	0	0	225.864.765
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.162.265	0	0	0	27.162.265
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.696.500	0	0	0	9.696.500
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	52.486.750	0	0	0	52.486.750
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	52.986.880	0	0	0	52.986.880
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23.224.750	0	0	0	23.224.750
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.313.980	0	0	0	42.313.980
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.993.640	0	0	0	17.993.640
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	839.076.706.564	0	0	0	839.076.706.564
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	838.896.114.244	0	0	0	838.896.114.244
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.592.320	0	0	0	180.592.320
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	285.128.000	0	0	0	285.128.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	282.696.000	0	0	0	282.696.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.432.000	0	0	0	2.432.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.425.144	27.865.600	0	0	232.290.744
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	875.048	27.865.600	0	0	28.740.648
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	137.000.000	0	0	0	137.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.550.096	0	0	0	66.550.096
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	905.744.098	0	0	0	905.744.098
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	109.916.178	0	0	0	109.916.178
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	217.772.800	0	0	0	217.772.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.744.800	0	0	0	61.744.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.06	07 Penyediaan Bahan/Material	285.962.320	0	0	0	285.962.320
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	103.750.000	0	0	0	103.750.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.598.000	0	0	0	126.598.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.907.100	372.519.000	0	0	677.426.100
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.978.828	0	0	0	299.978.828
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	0	170.838.000	0	0	170.838.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.928.272	201.681.000	0	0	206.609.272
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.174.811.660	0	0	0	6.174.811.660
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.996.500	0	0	0	60.996.500
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	923.578.200	0	0	0	923.578.200
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.190.236.960	0	0	0	5.190.236.960
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.408.384.400	45.016.400	0	0	1.453.400.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.760.000	0	0	0	181.760.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	45.016.400	0	0	65.016.400

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	123.199.840	0	0	0	123.199.840
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	123.199.840	0	0	0	123.199.840
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	39.470.600	0	0	0	39.470.600
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	83.729.240	0	0	0	83.729.240
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	137.208.240	0	0	0	137.208.240
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	137.208.240	0	0	0	137.208.240
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	137.208.240	0	0	0	137.208.240
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	453.110.300	0	0	0	453.110.300
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	453.110.300	0	0	0	453.110.300
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	51.050.000	0	0	0	51.050.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	245.012.300	0	0	0	245.012.300
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	157.048.000	0	0	0	157.048.000
TOTAL						5.013.582.925.198	1.858.994.304.311	68.123.915.460	644.228.590.760	7.584.929.735.729

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

21

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01				PELAYANAN UMUM					
01	01	1	01	Pendidikan	848.585.971.731	445.401.000	0	0	849.031.372.731
01	02	1	02	Kesehatan	232.652.762.055	3.150.201.915	0	0	235.802.963.970
01	03	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.276.776.907	7.138.240.040	0	0	52.415.016.947
01	04	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19.568.593.678	1.259.935.793	0	0	20.828.529.471
01	05	1	06	Sosial	20.966.045.575	541.880.753	0	0	21.507.926.328
01	06	2	07	Tenaga Kerja	3.670.172.026	117.585.333	0	0	3.787.757.359
01	07	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.263.190.250	3.372.000	0	0	6.266.562.250
01	08	2	11	Lingkungan Hidup	86.170.196.950	520.403.913	0	0	86.690.600.863
01	09	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.083.020.410	147.788.332	0	0	2.230.808.742
01	10	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.020.318.998	1.169.612.600	0	0	46.189.931.598
01	11	2	15	Perhubungan	16.023.905.589	154.473.780	0	0	16.178.379.369
01	12	2	16	Komunikasi dan Informatika	9.666.835.172	152.098.230	0	0	9.818.933.402
01	13	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.726.314.991	53.944.000	0	0	23.780.258.991
01	14	2	18	Penanaman Modal	9.271.019.917	134.200.200	0	0	9.405.220.117
01	15	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	13.641.388.225	268.554.007	0	0	13.909.942.232
01	16	2	20	Statistik	99.913.400	0	0	0	99.913.400
01	17	2	22	Kebudayaan	580.418.053	181.062.750	0	0	761.480.803
01	18	2	23	Perpustakaan	628.896.860	0	0	0	628.896.860
01	19	2	24	Kearsipan	15.737.397.524	388.585.511	0	0	16.125.983.035
01	20	3	25	Kelautan dan Perikanan	19.775.522.265	584.141.307	0	0	20.359.663.572
01	21	3	26	Pariwisata	10.825.724.610	267.949.760	0	0	11.093.674.370
01	22	3	27	Pertanian	61.288.605.868	128.246.200	0	0	61.416.852.068
01	23	3	28	Kehutanan	6.239.651.033	18.166.000	0	0	6.257.817.033
01	24	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	13.940.463.848	7.970.000	0	0	13.948.433.848
01	25	3	31	Perindustrian	13.260.561.621	161.004.960	0	0	13.421.566.581
01	26	4	01	Sekretariat Daerah	143.475.547.228	3.195.873.324	0	0	146.671.420.552

**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01	27	4	02	Sekretariat DPRD	141.434.153.043	1.034.941.814	0	0	142.469.094.857
01	28	5	01	Perencanaan	29.754.456.822	525.426.328	0	0	30.279.883.150
01	29	5	02	Keuangan	369.093.450.646	26.499.469.514	68.123.915.460	644.228.590.760	1.107.945.426.380
01	30	5	03	Kepegawaian	19.427.370.329	2.255.736.460	0	0	21.683.106.789
01	31	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	59.566.982.065	589.527.000	0	0	60.156.509.065
01	32	5	05	Penelitian dan Pengembangan	2.229.744.560	717.618.356	0	0	2.947.362.916
01	33	5	06	Pengelolaan Perbatasan Daerah	13.678.728.630	564.306.880	0	0	14.243.035.510
01	34	5	07	Penghubung	1.312.876.794	0	0	0	1.312.876.794
01	35	6	01	Inspektorat	31.416.891.858	2.458.415.781	0	0	33.875.307.639
01	36	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.975.237.862	183.523.630	0	0	8.158.761.492
03				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
03	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4.663.006.680	4.085.891.396	0	0	8.748.898.076
03	02	1	06	Sosial	523.336.920	0	0	0	523.336.920
03	03	4	01	Sekretariat Daerah	2.200.079.400	0	0	0	2.200.079.400
04				EKONOMI					
04	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.181.826.364	1.298.946.204.415	0	0	1.328.128.030.779
04	02	2	07	Tenaga Kerja	1.046.078.820	0	0	0	1.046.078.820
04	03	2	09	Pangan	1.312.166.060	0	0	0	1.312.166.060
04	04	2	15	Perhubungan	4.249.239.820	22.083.949.122	0	0	26.333.188.942
04	05	2	16	Komunikasi dan Informatika	2.222.794.332	93.791.960	0	0	2.316.586.292
04	06	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.795.085.370	0	0	0	2.795.085.370
04	07	2	18	Penanaman Modal	2.172.745.600	13.500.000	0	0	2.186.245.600
04	08	2	21	Persandian	353.345.830	37.089.760	0	0	390.435.590
04	09	3	25	Kelautan dan Perikanan	138.048.640.258	72.180.591.080	0	0	210.229.231.338
04	10	3	27	Pertanian	212.839.822.560	54.303.522.601	0	0	267.143.345.161
04	11	3	28	Kehutanan	161.944.219.381	3.728.065.343	0	0	165.672.284.724
04	12	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.334.173.280	55.000.000	0	0	3.389.173.280
04	13	3	30	Perdagangan	2.747.630.640	772.395.300	0	0	3.520.025.940
04	14	3	31	Perindustrian	6.658.896.560	0	0	0	6.658.896.560
05				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
05 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.973.629.328	0	0	0	3.973.629.328
05 02 2 10	Pertanahan	909.659.000	0	0	0	909.659.000
05 03 2 11	Lingkungan Hidup	5.443.794.336	4.420.556.400	0	0	9.864.350.736
05 04 3 28	Kehutanan	8.019.016.630	582.678.200	0	0	8.601.694.830
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	117.314.211.450	0	0	0	117.314.211.450
06 02 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.751.698.590	0	0	0	13.751.698.590
06 03 3 29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.108.306.600	0	0	0	1.108.306.600
07	KESEHATAN					
07 01 1 02	Kesehatan	192.422.602.878	68.231.417.439	0	0	260.654.020.317
08	PARIWISATA					
08 01 3 26	Pariwisata	15.875.744.270	1.812.879.503	0	0	17.688.623.773
10	PENDIDIKAN					
10 01 1 01	Pendidikan	1.685.785.177.593	269.666.592.431	0	0	1.955.451.770.024
10 02 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	9.492.468.152	0	0	0	9.492.468.152
10 03 2 22	Kebudayaan	9.462.579.210	848.922.000	0	0	10.311.501.210
10 04 2 23	Perpustakaan	5.266.728.270	377.858.280	0	0	5.644.586.550
11	PERLINDUNGAN SOSIAL					
11 01 1 06	Sosial	16.604.858.895	385.282.360	0	0	16.990.141.255
11 02 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.073.034.320	18.935.250	0	0	4.091.969.570
11 03 3 32	Transmigrasi	896.664.488	5.400.000	0	0	902.064.488
TOTAL		5.011.022.369.278	1.857.670.180.311	68.123.915.460	644.228.590.760	7.581.045.055.809

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	
	A SPM Bidang Pendidikan				
	Pendidikan Menengah				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	163.552.000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.355.318.500	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.708.200.000	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	64.072.661.040	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.494.233.611	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	234.306.349.721	
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			471.100.314.872
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	299.064.000	
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	147.413.214.950	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	153.075.200.000	
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			300.787.478.950
		Jumlah Pendidikan Menengah			771.887.793.822
	Pendidikan Khusus				
		Pengelolaan Pendidikan Khusus			
			Pembangunan Asrama Sekolah	825.360.000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	767.973.830	
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2.479.060.000	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	12.381.925.312	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1.166.895.730.000	
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus			1.183.350.049.142
		Jumlah Pendidikan Khusus			1.183.350.049.142
		Jumlah SPM Bidang Pendidikan			1.955.237.842.964
	B SPM Bidang Kesehatan				
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.633.119.680	
		Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			4.633.119.680
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			4.633.119.680
	Pelayanan Kesehatan Balita				

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti			2.300.147.590
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
			Penyediaan Permakanan	152.022.640
			Penyediaan Sandang	49.127.400
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	322.186.880
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			523.336.920
	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi			523.336.920
	Jumlah SPM Bidang Sosial			9.989.817.125

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.566.754.903.000	4.885.121.546.186
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	88.504.000.000	2.804.483.142.755
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.004.000.000	1.955.237.842.964
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.500.000.000	213.927.060
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	582.218.000.000	496.456.984.287
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	582.218.000.000	229.573.572.057
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.706.174.903.000	1.501.830.888.504
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.684.742.000.000	111.711.882.286
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.432.903.000	6.390.836.390
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.750.000.000	13.751.698.590
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.244.000.000	29.577.427.547
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.886.000.000	3.105.760.610
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	18.358.000.000	5.504.385.636
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	54.864.000.000	39.021.404.503
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	54.864.000.000	2.599.835.200
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	244.040.249.654	312.568.990.913
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17.688.000.000	4.833.836.179
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.032.000.000	10.358.531.820
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.732.000.000	1.531.051.880
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.300.000.000	290.742.980
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.148.000.000	1.312.166.060
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15.112.000.000	96.554.951.599
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	15.112.000.000	798.561.760
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	84.060.249.654	46.189.931.598
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	84.060.249.654	36.578.322.110
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24.836.000.000	42.511.568.311

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.461.434.922	2.947.362.916
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.461.434.922	2.947.362.916
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN	6.638.000.000	14.243.035.510
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	6.638.000.000	1.928.067.780
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	8.094.000.000	1.312.876.794
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	8.094.000.000	793.229.700
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	29.748.000.000	33.875.307.639
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	29.748.000.000	33.875.307.639
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	29.748.000.000	12.459.903.180
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.344.000.000	8.158.761.492
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.344.000.000	8.158.761.492
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.344.000.000	340.866.630

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

al

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021									
Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)	
1.01.2.22.0.00.01.00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.898.422.769.200	2.815.556.124.768	2.815.556.124.768	
1.01.2.22.0.00.01.00	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.884.020.640.200	2.804.483.142.755	2.804.483.142.755	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.883.525.640.200	2.804.483.142.755	2.804.483.142.755	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	988.811.712.600	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	849.031.372.731	849.031.372.731	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	225.864.765	225.864.765	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	27.162.265	27.162.265	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	9.696.500	9.696.500	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	52.486.750	52.486.750	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	52.986.880	52.986.880	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	23.224.750	23.224.750	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	42.313.980	42.313.980	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	17.993.640	17.993.640	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan	858.178.023.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	839.076.706.564	839.076.706.564	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	858.178.023.000	838.896.114.244	838.896.114.244	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	180.592.320	180.592.320	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	285.128.000	285.128.000	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03	Administrasi Umum	130.633.689.600	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	282.696.000	282.696.000	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	980.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	2.432.000	2.432.000	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	124.459.689.600	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	988.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	276.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.00	1	01	01	1.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	331.000.000	0	0	

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	137.208.240	137.208.240
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	137.208.240	137.208.240
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.401.560.900	453.110.300	453.110.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.401.560.900	453.110.300	453.110.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	71.000.000	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	51.050.000	51.050.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.868.644.900	245.012.300	245.012.300
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	461.916.000	157.048.000	157.048.000

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021									
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Satuan Polisi Pamong Praja	10.662.376.000	0	0	0	10.662.376.000	100
			Dinas Sosial	4.938.000	0	0	0	4.938.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
			Dinas Sosial	14.649.500	0	0	0	14.649.500	100
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
			Dinas Sosial	243.743.300	0	0	0	243.743.300	100
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
			Dinas Sosial	2.013.800	0	0	0	2.013.800	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
			Dinas Sosial	19.438.000	0	0	0	19.438.000	100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
			Dinas Sosial	49.127.400	0	0	0	49.127.400	100
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.255.730	0	0	0	29.255.730	100
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.883.430	0	0	0	35.883.430	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.658.192.000	0	0	0	5.658.192.000	100
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.000.000	0	0	0	12.000.000	100
			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.619.816.008	0	0	0	21.619.816.008	100
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.214.500	0	0	0	70.214.500	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	127.827.500	0	0	0	127.827.500	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Kelautan dan Perikanan	1.128.600	0	0	0	1.128.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
			Dinas Kelautan dan Perikanan	40.291.460	0	0	0	40.291.460	100

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.127.160	0	0	0	3.127.160	100
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	98.708.370	0	0	0	98.708.370	100
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
			Badan Kepegawaian Daerah	34.036.430	0	0	0	34.036.430	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	37.000.000	0	0	0	37.000.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
			Inspektorat Daerah Provinsi NTT	85.680.000	0	0	0	85.680.000	100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
			Inspektorat Daerah Provinsi NTT	93.593.000	0	0	0	93.593.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.950.000	0	0	0	5.950.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	504.612.980	0	0	0	504.612.980	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.470.600	0	0	0	39.470.600	100

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

al

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.127.160	0	0	0	3.127.160	100
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	98.708.370	0	0	0	98.708.370	100
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
			Badan Kepegawaian Daerah	34.036.430	0	0	0	34.036.430	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	37.000.000	0	0	0	37.000.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
			Inspektorat Daerah Provinsi NTT	85.680.000	0	0	0	85.680.000	100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
			Inspektorat Daerah Provinsi NTT	93.593.000	0	0	0	93.593.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.950.000	0	0	0	5.950.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	504.612.980	0	0	0	504.612.980	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.470.600	0	0	0	39.470.600	100

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

LAMPIRAN X RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR : 8 Tahun 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	GOLONGAN	ESELON							NON ESELON		JUMLAH
		I-b	II-a	II-b	III-a	III-b	IV-a	IV-b	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
	Golongan IV / e	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3
	Golongan IV / d	-	16	-	-	-	-	-	4	4	24
	Golongan IV / c	-	14	6	1	-	-	-	18	4	43
	Golongan IV / b	-	4	-	121	24	6	-	627	46	828
	Golongan IV / a	-	-	-	47	51	117	4	1.643	101	1.963
	JUMLAH GOLONGAN IV	1	34	6	169	75	123	4	2.294	155	2.861
	Golongan III / d	-	-	-	7	18	455	6	1.496	612	2.594
	Golongan III / c	-	-	-	1	-	109	4	1.895	754	2.763
	Golongan III / b	-	-	-	-	-	14	-	1.216	1.453	2.683
	Golongan III / a	-	-	-	-	-	-	-	349	1.458	1.807
	JUMLAH GOLONGAN III	-	-	-	8	18	578	10	4.956	4.277	9.847
	Golongan II / d	-	-	-	-	-	-	-	86	515	601
	Golongan II / c	-	-	-	-	-	-	-	30	493	523
	Golongan II / b	-	-	-	-	-	-	-	10	321	331
	Golongan II / a	-	-	-	-	-	-	-	1	136	137
	JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	-	-	127	1.465	1.592

NO.	GOLONGAN	ESELON							NON ESELON		JUMLAH
		I-b	II-a	II-b	III-a	III-b	IV-a	IV-b	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
	Golongan I / d	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39
	Golongan I / c	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
	Golongan I / b	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24
	Golongan I / a	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	JUMLAH GOLONGAN I	-	-		-	-	-	-	-	93	93
	TOTAL	1	34		177	93	701	14	7.377	5.990	14.393

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



& VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u

LAMPIRAN XI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR : 8 Tahun 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A.	PIUTANG PENDAPATAN		1.565.384.900,54	0,00	1.565.384.900,54	0,00
	1. Piutang Pajak		852.584.900,54	0,00	852.584.900,54	0,00
	a. Piutang Pajak Air Bawah Tanah / Air Permukaan		161.049.804,60	-	161.049.804,60	-
	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2019	161.049.804,60	-	161.049.804,60	-
	b. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		691.535.095,94	-	691.535.095,94	-
	- Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2019	691.535.095,94	-	691.535.095,94	-
	2. Piutang Retribusi		712.800.000,00	0,00	712.800.000,00	0,00
	a. Piutang Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah		712.800.000,00	0,00	712.800.000,00	0,00
	- Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2019	712.800.000,00	-	712.800.000,00	-
	3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		0,00	0,00	0,00	0,00
	- ASKRIDA	2019	0,00	-	0,00	-

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
B.	PIUTANG LAIN-LAIN		77.031.835.764,00	0,00	77.031.835.764,00	0,00
	1. Piutang Jasa Pelayanan		36.521.539.989,00	-	36.521.539.989,00	0,00
	- RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	2019	36.521.539.989,00	-	36.521.539.989,00	-
	2. Piutang Lain-Lain		40.510.295.775,00	-	40.510.295.775,00	0,00
	- Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2019	40.510.295.775,00	-	40.510.295.775,00	-
C.	PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN		4.102.781.667,70	0,00	4.102.781.667,70	0,00
	1. Bagian Lancar Kredit Kendaraan		4.102.781.667,70	0,00	4.102.781.667,70	0,00
	BPKKAD (PPKD)		4.102.781.667,70	0,00	4.102.781.667,70	0,00
	a. Kendaraan Roda 2 (Dua)	2019	2.154.865.717,06	-	2.154.865.717,06	-
	b. Kendaraan Roda 4 (Empat)	2019	1.947.915.950,64	-	1.947.915.950,64	-
	JUMLAH		82.700.002.332,24	0,00	82.700.002.332,24	0,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

ny

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DI SERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH) TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI THN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1.	1980	PT. Semen Kupang		Saham dalam bentuk tanah	1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
3.	1985	PT. BANK NTT	Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi NTT No. 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah		490.162.000.000	405.162.000.000	85.000.000.000	490.162.000.000	-	85.000.000.000	-	490.162.000.000
				Penyertaan Modal	489.172.115.000	404.172.115.000	85.000.000.000	489.172.115.000	-	85.000.000.000	-	489.172.115.000
				Saham	989.885.000	989.885.000	-	989.885.000	-	-	-	989.885.000
2.	1987	PT. FLOBAMOR	Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi NTT No. 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah	Penyertaan Modal	19.426.813.000	19.426.813.000	-	19.426.813.000	-	2.000.000.000	-	19.426.813.000
4.	1995/1996	PT. ASKRIDA	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penambahan Modal pada PT. Askrida	Penyertaan Modal	1.600.000.000	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-	300.000.000	-	1.600.000.000
5.	2012	PT. JAMKRIDA	Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah NTT	Penyertaan Modal	175.000.000.000	100.000.000.000	25.000.000.000	125.000.000.000	50.000.000.000	7.000.000.000	-	125.000.000.000
6.	2019	PT. KI Bolok (Perseroda)	Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada PT. Kawasan Industri Bolok	Penyertaan Modal	95.000.000.000	2.000.000.000	35.000.000.000	37.000.000.000	58.000.000.000	2.048.316.130	-	37.000.000.000

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

ay

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2019	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PADA AKHIR TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1.	Aset Tetap	Tanah	2.816.892.864.072,79	-	-	2.816.892.864.072,79
		Mesin dan Peralatan	992.497.810.336,38	371.265.948.832,00	-	1.363.763.759.168,38
		Gedung dan Bangunan	1.782.045.724.355,76	181.121.886.494,00	-	1.963.167.610.849,76
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.350.087.932.132,91	582.218.485.251,00	-	4.932.306.417.383,91
		Aset Tetap Lainnya	147.934.201.305,68	1.092.546.200,00	-	149.026.747.505,68
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	364.927.489.567,49	94.888.120.000,00	-	459.815.609.567,49
		Akumulasi Penyusutan	(2.480.534.355.962,66)	-	-	(2.480.534.355.962,66)
2.	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
		Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain				
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
	JUMLAH		7.973.851.665.808,35	1.230.586.986.777	-	9.204.438.652.585

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT
 NOMOR : 8 Tahun 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	LOKASI SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)		JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp.)	
				APBD TA. 2020	PERUBAHAN APBD TA. 2020		APBD TA. 2021	PERUBAHAN APBD TA. 2021
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, Flores Timur, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur	94.888.120.000	94.888.120.000	47.444.060.000	94.888.120.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

ny

LAMPIRAN XV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT
NOMOR : 8 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp.)	SALDO AWAL (Rp.)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp.)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp.)	SALDO AKHIR (Rp.)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		-		-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SUMBER PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	SADAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	TANGGAL / TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN / OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp.)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (THN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp.)		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp.)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PERJ - 096/SMI/0820	5 Agustus 2020	189.776.240.000	18 Bulan	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 7 Ruas	189.776.240.000	Bunga (2020)	-	-
		B. KEUDA. 910.3/1592.AK/VIII/2020		66.684.000.000				66.684.000.000		-	-
		PERJ - 097/SMI/0820	5 Agustus 2020	123.092.240.000	96 Bulan		Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 9 Ruas	123.092.240.000		-	
		B. KEUDA. 910.3/1593.AK/VIII/2020					Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi; Pembangunan Embung dan Pembangunan jaringan SPAM Air Bersih Pengembangan budidaya ikan Kerapu, Kakap dan Kakap Putih Pengembangan Komoditas Pertanian dan Perkebunan serta Pengembangan Penangkaran Benih Tanaman Pangan Pengembangan peternakan Sapi Wagyu, Sapi Timor, Kambing, Babi, Ayam serta pembangunan Pabrik Pakan Ternak Pengembangan Tanaman Porang di dalam Kawasan Hutan		Provisi Biaya Pengelolaan	15.000.000.000 2.775.000.000	1.500.000.000.000 -
2	PT. Bank NTT	376/DIR-DPKrKM/III/2020	19 Maret 2020	150.000.000.000	36 Bulan	10,50%	Peningkatan Ruas Jalan Provinsi NTT	75.000.000.000	Bunga	12.304.687.500	75.000.000.000 4.320.312.500

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNSTILU LAISKODAT